



## PENYULUHAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA KARANG TARUNA KECAMATAN PANYINGKIRAN

Yeti Kuswati

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Majalengka,  
Jawa Barat, Indonesia.

e-mail: yeti.kuswati@yahoo.co.id.

Riwayat artikel: diterima September 2019, diterbitkan Oktober 2019

### Penulis koresponden



### Abstract

*The implementation of community service programs is motivated by the problem of the lack of understanding of the political and electoral system faced by youth of Karang Taruna throughout the District of Panyingkiran as first-time voters. To solve this problem political education counseling is conducted with the aim of increasing knowledge, understanding, insight, and awareness and interest in using voting rights in elections. The method used is counseling for management and members of the Youth Organization in Panyingkiran District. The material presented includes the deepening of the Pancasila and the 1945 Constitution, democracy and the political system in Indonesia, the election as the implementation of the Pancasila ideology, and the participation of the younger generation in the election. Based on the results of the evaluation, the results of the activities showed that the process of implementing community service activities went very well, the absorption capacity of the extension participants to the material presented reached 69%. Qualitatively, novice voters have additional knowledge, understanding, insight, and awareness about politics and are willing to actively participate in channeling their voting rights in elections. In conclusion, political education counseling can increase knowledge, understanding, and insight as well as political awareness of the youth voter voters of Karang Taruna Districts throughout Panyingkiran District*

**Keywords:** *Counseling; Political Education; Beginner Voter; Youth Youth Organization.*

Jurnal **PARAHITA  
ABDIMAS** Jurnal  
Pengabdian Masyarakat  
diterbitkan oleh Program  
Pascasarjana Universitas  
Majalengka

### Abstrak

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dilatarbelakangi masalah rendahnya pemahaman terhadap sistem politik dan pemilu yang dihadapi pemuda Karang Taruna se-Kecamatan Panyingkiran sebagai pemilih pemula. Untuk memecahkan masalah tersebut dilakukan penyuluhan pendidikan politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, wawasan, dan kesadaran serta minat menggunakan hak pilih dalam pemilu. Metode yang digunakan adalah penyuluhan bagi pengurus dan anggota Karang Taruna se-Kecamatan Panyingkiran. Materi yang disajikan meliputi pendalaman Pancasila dan UUD 1945, demokrasi dan sistem politik di Indonesia, Pemilu sebagai implementasi ideologi Pancasila, dan partisipasi generasi muda dalam pemilu. Berdasarkan hasil evaluasi, hasil kegiatan menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan sangat baik, daya serap peserta penyuluhan terhadap materi yang disajikan mencapai 69%. Secara kualitatif, pemilih pemula memiliki tambahan pengetahuan, pemahaman, wawasan, dan kesadaran tentang politik dan bersedia berpartisipasi aktif dalam menyalurkan hak pilihnya pada pemilu. Kesimpulan, penyuluhan pendidikan politik dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan serta kesadaran berpolitik pemilih pemula pemuda Karang Taruna se-Kecamatan Panyingkiran.

**Kata kunci :** Penyuluhan; Pendidikan Politik; Pemilih Pemula, Pemuda Karang Taruna.

## PENDAHULUAN

Bagi bangsa Indonesia, Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sudah menjadi bagian dari sistem demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena setiap lima tahun sekali akan berulang. Dari sekian banyak dinamika Pemilu, salah satu yang tak pernah absen dari perbincangan para pihak berkepentingan adalah fenomena pemilih pemula, yaitu para remaja/pemuda yang baru memenuhi persyaratan batas usia minimal sebagai pemilih. Mereka adalah warga Indonesia yang lima tahun lalu belum berhak memilih karena alasan usia. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum, pada Bab I, Pasal 1, angka 16 dikemukakan bahwa "Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin".

Secara formal, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memiliki agenda khusus tentang sosialisasi pemilu, termasuk di dalamnya pendidikan pemilih untuk pemilih pemula, karena setiap pemilihan umum diselenggarakan akan selalu muncul pemilih pemula. Bagi KPU, sosialisasi pemilu merupakan kewajiban, karena merupakan proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program Penyelenggaraan Pemilu. Di dalamnya terdapat pendidikan pemilih yang mutlak perlu dilakukan, apalagi bagi pemilih pemula. Dengan tujuan di samping demi suksesnya penyelenggaraan pemilu secara umum, juga merupakan kesempatan yang baik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, karena pemilih pemula akan menjadi penerus proses demokrasi di masa depan. Maka jika pemilih pemula dibekali pendidikan politik yang baik sejak dini, diharapkan kelak para pemilih pemula akan menjadi pelopor pemilih yang cerdas dan realistis. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 10 Tahun 2018, dijelaskan bahwa "Pendidikan pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih

untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu".

Selanjutnya, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum, pada Bab II, Pasal 5 dijelaskan tentang sasaran sosialisasi dari berbagai komponen, dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini, sasaran yang dituju adalah komponen berbasis pemilih pemula dan pemilih pemula yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna se-Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka. Sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mitra, kegiatan PKM ini dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan pendidikan politik bagi pemilih pemula pada Karang Taruna.

Secara etimologis, penyuluhan adalah :

1. Proses, cara, perbuatan menyuluh (KBBI Online),
2. Penerangan;
- 3) Pengintaian, penyelidikan. (kbbi-web,suluh).

Dengan memperhatikan pengertian penyuluhan secara etimologis, maka pengertian menurut istilah jika dikaitkan dengan sasaran dan materi pendidikan politik yang akan disajikan, maka penyuluhan dapat diartikan "Usaha dalam membantu dan meningkatkan pengetahuan pemilih pemula dalam bidang politik untuk meningkatkan kesadaran dan minat berpartisipasi dalam pemilu". Pelaksanaan kegiatan penyuluhan mempertimbangkan teori Uphoff dalam Sudono, Dwi (2008), bahwa dalam kegiatan penyuluhan manusia tidak dianggap sebagai sasaran apalagi objek, melainkan dijadikan sebagai pemanfaat yang diharapkan, dalam arti kelompok pemuda pemilih pemula didorong agar dirinya merasa diuntungkan dengan adanya program penyuluhan. Dengan demikian, diadakannya kegiatan penyuluhan para pemuda anggota karang taruna menjadi lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak serta pelan-pelan muncul kemandirian. Kaitannya dengan pemilihan umum, para pemilih pemula diharapkan memiliki kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya secara bijak dan mampu menentukan pilihan yang rasional dan cerdas demi kejayaan bangsa.

Kegiatan penyuluhan pendidikan politik bagi pemilih pemula berada pada posisi yang sangat strategis dan essential, mengingat bahwa secara kuantitatif potensi pemuda Indonesia sangat besar. Pada tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia pada usia muda sebanyak 62.985.401 jiwa sama dengan 29,5% dari total jumlah penduduk sebanyak 213.287 juta jiwa (BPS,2013). Hal kedua, pentingnya penyuluhan pendidikan politik bagi pemilih pemula atas dasar fakta historis bahwa pemuda merupakan kekuatan besar yang dapat bertindak sebagai pelopor perubahan ke arah yang lebih baik. Alasan lain pentingnya penyuluhan pendidikan politik, dengan memperhatikan fenomena umum yang terjadi di Indonesia, bahwa pasca reformasi partisipasi masyarakat dalam pemilu semakin menurun. Maka, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memotivasi pemuda pemilih pemula sebagai harapan bangsa, agar terjadi perubahan ke arah yang lebih baik.

Pendidikan politik adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sejalan dengan kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi (Kantaprawira(2004:55). Secara yuridis, agar pelaksanaan pendidikan politik dapat berjalan dengan baik dan mampu mencapai tujuannya, khususnya pendidikan politik untuk generasi muda, termasuk di dalamnya bagi pemilih pemula, telah terbit Inpres Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyatakan bahwa "Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara".

Selain itu, berkenaan dengan pendidikan politik bagi generasi muda terdapat tujuan yang lebih luas maknanya, yaitu bertujuan untuk menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945 sebagai salah satu usaha membangun manusia seutuhnya, yaitu manusia yang masuk kategori insan kamil, bahkan kamil mukamil.

Dari segi materi, pendidikan politik memiliki karakter yang relatif tetap, dalam arti tidak banyak mengalami perubahan substansi, walaupun ada hanya bersifat adaptif sesuai dengan tuntutan perubahan sosial dan iptek. Dengan demikian, sampai saat ini pelaksanaan pendidikan politik di Indonesia mengacu pada dasar hukum konstitusi, yaitu pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Jadi, seluruh materi pendidikan politik harus mengacu pada amanat pancasila dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Termasuk di dalamnya, pendidikan politik bagi pemuda sebagai pemilih pemula. Secara yuridis, materi atau kurikulum pendidikan politik berpedoman kepada Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyebutkan bahwa bahan pendidikan politik adalah : a) Penanaman kesadaran berideologi, berbangsa, dan bernegara; b) Kehidupan dan kerukunan hidup beragama; c) Motivasi berprestasi; d) Pengamalan kesamaan hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia; e) Pengembangan kemampuan politik dan kemampuan pribadi untuk mewujudkan kebutuhan dan keinginan ikut serta dalam politik; f) Disiplin pribadi, sosial, dan nasional; g) Kepercayaan pada pemerintah; dan h) Kepercayaan pada pembangunan yang berkesinambungan.

Dengan demikian, penyuluhan pendidikan politik bagi pemilih pemula pemuda karang taruna memiliki dampak positif dalam jangka panjang, karena pemuda merupakan generasi penerus bangsa sekaligus harapan bangsa.

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial (Peraturan Menteri Sosial RI No. 83/HUK/2005). Secara teoretis, karang taruna adalah "Organisasi sosial kepemudaan, pilar kekuatan masyarakat yang berperan langsung sebagai insan-insan pembangunan baik di desa maupun di kelurahan dan Karang Taruna

harus terus mengikuti dinamika perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan jernih dan memakai akal sehat” (Iin, 2016). Dari segi keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh generasi muda dalam lingkungan desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang berusia 11 tahun sampai dengan 45 tahun, selanjutnya disebut sebagai warga Karang Taruna. Setiap generasi muda dalam kedudukannya sebagai warga Karang Taruna mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik dan agama. Kaitannya dengan kegiatan PKM ini, tentu yang menjadi sasaran penyuluhan adalah anggota Karang taruna yang berusia 17 tahun yang telah memiliki hak pilih sebagai pemilih pemula.

Fenomena yang terjadi di lapangan, setiap menjelang pemilu kelompok pemilih pemula ini akan menjadi sasaran utama oleh kontestan pemilu untuk dipertimbangkan sebagai salah satu elemen kemenangan pemilu. Sering terjadi adanya kegiatan yang dilakukan oleh kontestan pemilu dengan tujuan melakukan pendidikan politik, tetapi bukan untuk mencerdaskan dan menyadarkan secara hakiki, melainkan diarahkan ke satu arah tertentu. Maka, untuk menghindari proses pembentukan mental parsial sebagai anak bangsa, diperlukan pendidikan politik yang netral dan rasional, sehingga diharapkan akan terbentuk kelompok pemilih yang memahami betul tentang masalah politik secara luas berkenaan dengan kepentingan bangsa secara utuh, bukan untuk kepentingan golongan tertentu.

Berdasarkan fenomena di atas, tim pengabdian kepada masyarakat berbasis akademik bermaksud memberikan pencerahan kepada kelompok pemilih pemula dari para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna se-Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka melalui kegiatan penyuluhan pendidikan politik. Kegiatan tersebut bertujuan untuk :

- 1) Memberikan informasi tentang sistem politik yang berlaku di Negara Republik Indonesia, agar memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara;
- 2) Agar

memahami tahapan, jadwal, dan program Pemilu; 3) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemuda pemilih pemula tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu; 4) Meningkatkan minat pemuda pemilih pemula untuk berpartisipasi sebagai pemilih dalam Pemilu.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan mencakup dua bagian pokok, yaitu metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM), dan kedua metode penyuluhan pendidikan politik bagi pemilih pemula pemuda Karang Taruna se-Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka.

### **1. Metode Pelaksanaan PKM.**

#### **a. Identifikasi Masalah**

Identifikasi adalah berusaha mencari permasalahan, menemukan, dan membuat daftar masalah yang terjadi di kalangan pemuda pemilih pemula berkenaan dengan tingkat pengetahuan terhadap sistem politik dan kesadaran dalam berpartisipasi dalam pemilu. Dengan memperhatikan fenomena global tentang rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu dan tingginya angka golput, kemudian mempersempit wilayah kajian ke wilayah Kecamatan, ternyata hal serupa terdapat juga di Kecamatan Panyingkiran. Untuk memudahkan alur komunikasi dan koordinasi, dipilih jalur organisasi Karang Taruna. Maka ditetapkanlah topik utama yang dipertimbangkan untuk segera diucari jalan pemecahannya, yakni melalui penyuluhan pendidikan politik bagi pengurus dan anggota Karang Taruna se-Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka.

#### **b. Survey lokasi**

Survey lokasi dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi pemuda pemilih pemula secara lebih mendalam dan akurat. Melalui survey ini diperoleh data dan informasi lebih lengkap berkenaan dengan masalah yang dihadapi Karang Taruna se-Kecamatan Panyingkiran, sehingga tim dapat menetapkan topik yang paling *urgent* untuk dipilih dalam memecahkan masalah yang dihadapi para pemuda

pemilih pemula. Di samping itu, melalui survey lapangan diketahui jumlah sebanyak sembilan organisasi Karang Taruna dan calon pemilih pemula se-Kecamatan Panyingkiran yang tersebar di sembilan desa, yaitu Bantrangsana, Bonang, Cijurey, Jatipamor, Jatiserang, Karyamukti, Leuwiseeng, Penyingkiran, dan Pasirmuncang. Berdasarkan data dari [infopemilu.kpu.go.id](http://infopemilu.kpu.go.id) jumlah pemilih tetap terbanyak berada di Desa Karyamukti (3.862 jiwa) dan paling sedikit berada di desa Bantrangsana (1.800 jiwa). Dengan demikian, jumlah calon pemilih pemula di setiap desa beragam.

#### c. Study Kepustakaan

Study kepustakaan dilakukan untuk memperoleh dukungan teoretis yang relevan dengan metode pelaksanaan PKM, terutama landasan teoretis tentang pendidikan politik dan sosialisasi pemilu. Selain itu, diperlukan juga untuk memperoleh informasi tentang tata cara penyuluhan yang baik dan benar. Dari hasil study kepustakaan tim memperoleh informasi yang memadai dan akurat tentang aturan-aturan yang berlaku dan materi utama dalam pendidikan politik, yaitu materi yang sesuai dengan kondisi mitra sasaran.

#### d. Menyusun Materi

Dengan memperhatikan hasil survey lapangan dan study kepustakaan, tim menyusun materi penyuluhan berkenaan dengan pendidikan politik bagi pemilih pemula Karang Taruna. Secara garis besar, materi disusun sebagai berikut: 1) Pendalaman Pancasila dan UUD RI tahun 1945; 2) Demokrasi dan Sistem Politik di Indonesia; 3) Pemilu sebagai implementasi sistem Demokrasi berlandaskan Pancasila; 4) Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu.

## 2. Metode Pelaksanaan Penyuluhan Pendidikan Politik.

Bagian kedua mengenai metode pelaksanaan kegiatan inti dari PKM, yaitu penyuluhan pendidikan politik yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, wawasan dan kesadaran berpolitik serta bersedia berpartisipasi

dalam pemilu dengan menggunakan hak pilih secara bijaksana. Secara umum, tujuan besar dari kegiatan ini agar pemuda pemilih pemula memahami prosedur pelaksanaan pemilu dan berpartisipasi atas kesadaran sendiri. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, dirancang kegiatan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

#### a. Tahap persiapan

Pada tahapan persiapan, tim PKM melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama pemerintah kecamatan, KPU Daerah Majalengka, khususnya dari Divisi SDM dan Parmas Dr. H. Diding Bajuri, M.Si. serta para kepala desa se-Kecamatan Panyingkiran. Hal penting yang dibahas dalam tahapan ini setelah diperoleh ijin antara lain menetapkan waktu, mempersiapkan tempat beserta fasilitas yang diperlukan. Dalam hal ini, tim PKM mendapat bantuan dan dukungan yang sangat berharga dari pihak-pihak terkait sehingga tahap persiapan berjalan lancar.

#### b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan penyuluhan, terbagi atas dua acara pokok, yaitu acara pembukaan dan acara inti berupa penyuluhan. Peserta penyuluhan yang hadir terdiri atas pengurus dan anggota Karang Taruna yang telah berusia 17 tahun sebagai calon pemilih pemula. Nara sumber yang menyajikan materi terdiri atas tim PKM dan mengundang pakar yang ahli di bidangnya.

#### c. Tahap Evaluasi

Evaluasi memegang peranan penting dan strategis, berguna untuk mengukur pelaksanaan PKM dan dampak yang ditimbulkannya. Selain itu, secara khusus evaluasi diperlukan untuk melihat daya serap peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan.

Kegiatan penyuluhan pendidikan politik bagi pemuda pemilih pemula yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna se-Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka. Pelaksanaan pada bulan Hari Kamis 7 Maret 2018, bertempat di aula Kantor Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka. Untuk lebih jelasnya, dikemukakan dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Pengabdian

No	Tanggal	Tahap	Kegiatan
1	19 sd 25 Feb 2018	Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait</li> <li>▪ Menentukan waktu dan tempat kegiatan</li> </ul>
2	07 Maret 2018	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Upacara pembukaan</li> <li>▪ Penyuluhan Pendidikan Politik</li> </ul>
3	07 sd 08 Maret 2018	Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Evaluasi kegiatan PKM</li> <li>▪ Evaluasi pelaksanaan Penyuluhan</li> </ul>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya dilihat secara keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan pendidikan politik bagi pemilih pemula anggota Karang Taruna Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berjalan dengan baik dan sesuai jadwal.

Tercapainya keberhasilan kegiatan sehingga berjalan lancar dan sukses berkat dukungan berbagai pihak, antara lain Pemerintah Kecamatan setempat, unsur KPU Kabupaten Majalengka, Para Kepala Desa, tokoh masyarakat dan pengurus Karang Taruna se Kecamatan Panyingkiran.

Hasil pengabdian dilihat dari dua bagian, yakni ; pertama hasil kegiatan tahap awal berupa temuan hasil observasi dan wawancara dengan pihak terkait untuk mengetahui kondisi pemilih pemula, khususnya para pemuda yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna di Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka. Kedua hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM), baik pelaksanaan keseluruhan, maupun hasil kegiatan penyuluhan pendidikan politik bagi pemilih pemula yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna.

### 1. Hasil Observasi

Observasi dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang data pemilih pemula di Kecamatan Panyingkiran. Dalam hal ini, Tim PKM mendatangi lokasi

pengabdian kepada masyarakat (PKM) menemui pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam pengelolaan data dan informasi terkait pemilih, terutama pemilih pemula. Selain mempelajari dokumen-dokumen dan data-data yang tertera di papan informasi, juga melakukan wawancara dengan pejabat terkait, juga dengan para pemuda yang berstatus pemilih pemula serta berusaha mencari data dengan mengakses situs <https://infopemilu.kpu.go.id.dpt>. bertujuan memperoleh data yang akurat tentang daftar pemilih sementara. Dari salah satu sumber, diperoleh gambaran bahwa pada pemilu 2018, jumlah pemilih pemula di Provinsi Jawa Barat sekitar 30% (CEPP Fisip UI dan KPU Prov Jabar, 2018). Sementara, dari [infopemilu.kpu.go.id](https://infopemilu.kpu.go.id) diperoleh data calon pemilih keseluruhan di Kecamatan Panyingkiran adalah sebagai berikut.

Tabel. 2 Sebaran Pemilih Tetap dan Perkiraan Pemilih Pemula se-Kecamatan Panyingkiran

No	Desa	Jumlah Pemilih	Pemilih Pemula
1	Bantrangsana	1.123	336
2	Bonang	2.513	753
3	Cijurey	1.800	540
4	Jatipamor	2.635	790
5	Jatiserang	2.726	817
6	Karyamukti	3.862	1.158
7	Leuwiseeng	3.683	1.104
8	Panyingkiran	3.079	923
9	Pasir Muncang	2.605	781
		24.026	7.202

Sumber: [infopemilu.kpu](https://infopemilu.kpu), 2018; Data diolah

Dari data yang tertera pada tabel 2, diperoleh gambaran kasar tentang jumlah pemilih pemula di Kecamatan Panyingkiran sekitar 7202 jiwa. Besaran angka tersebut dihitung berdasarkan perkiraan KPU Provinsi Jawa Barat sebesar 30% x jumlah pemilih keseluruhan dengan kisaran usia 17-29 tahun. Sedangkan pemilih pemula yang tergabung pada organisasi Karang Taruna kebanyakan kisaran usia 22-29 tahun, karena sebagian pemuda yang berusia 17 – 21 masih berada di bangku sekolah sehingga kurang aktif dalam kegiatan karang taruna. Berimbang pada jumlah yang hadir pada saat pelaksanaan penyuluhan, tidak sebanyak itu. Dari data yang tercatat dalam daftar hadir, diketahui sebagai berikut:

Tabel. 3 Rekapitulasi Peserta Penyuluhan Pendidikan Politik

No	Desa	Jumlah Pemilih	Peserta Penyuluhan
1	Bantrangsana	1.123	25
2	Bonang	2.513	45
3	Cijurey	1.800	34
4	Jatipamor	2.635	49
5	Jatiserang	2.726	35
6	Karyamukti	3.862	82
7	Leuwiseeng	3.683	75
8	Panyingkiran	3.079	62
9	Pasir Muncang	2.605	38
		24.026	445

Sumber: Hasil Kegiatan PKM 2018

Dari hasil wawancara secara random, tim PKM memperoleh informasi bahwa secara umum pemilih pemula anggota Karang Taruna telah mengetahui tentang pemilu, baik pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, maupun pemilihan anggota legislatif. Tetapi ketika didalami tentang hak dan kewajiban warga negara terkait pemilu, dampak penggunaan hak suara kepada nasib bangsa ke depan, dan kaitannya dengan sistem politik yang berlaku di Indonesia rata-rata tidak mampu menjawab dengan jelas. Apalagi ditanya tentang hakikat keberadaan partai peserta pemilu, tidak ada jawaban yang menggambarkan bahwa mereka memahami makna politik yang sesungguhnya.

Dari hasil analisis terhadap hasil observasi dan wawancara diperoleh gambaran bahwa pengetahuan para pemilih pemula tentang politik lebih banyak didominasi oleh informasi yang bersumber dari kader-kader partai tertentu dengan tujuan tertentu. Kesan umum yang mereka peroleh hanya bersifat hura-hura, pertemuan dikemas dalam suasana yang hingar-bingar dengan iringan musik yang sangat kuat mengusik gerak fisik tanpa diimbangi dengan pemahaman mendalam tentang makna pemilu. Para narasumber yang bertugas menyampaikan materi biasanya bicara lantang, bernada pembakar semangat sesaat, menggiring opini ke satu titik, dihiasi dengan warna-warna tertentu. Nalar peserta acara terkontaminasi oleh penyajian musik dan lantunan lagu dari para artis yang cenderung hedonis.

Dilihat dari segi pendidikan politik kurang baik, karena para pemuda tidak memperoleh informasi yang lengkap dan komprehensif sehingga penggunaan hak pilih tidak didasari pemikiran rasional dan miskin visi ke depan.

Maka, dari gambaran tersebut tim PKM semakin yakin bahwa penyuluhan tentang pendidikan politik bagi pemilih pemula para pemuda-pemudi yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna mutlak diperlukan, secara spesifik bertujuan untuk membangun gerakan memilih yang cerdas, kritis, dan berorientasi kepada masa depan bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

## 2. Hasil Kegiatan PKM

Sesuai dengan tujuan kegiatan PKM, bahwa kondisi dan fenomena yang teridentifikasi pada saat observasi perlu dilakukan tindakan pemecahan masalah sesuai dengan karakter mitra PKM. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dilakukan peningkatan pemahaman pemilih pemula melalui program penyuluhan pendidikan politik dengan menyajikan materi-materi yang relevan.

Untuk mengetahui hasilnya, baik proses maupun hasil yang ditunjukkan dengan kadar daya serap peserta, dilakukan evaluasi sehingga diperoleh hasil secara kuantitatif dan kualitatif sebagai berikut.

### a. Hasil Kegiatan Secara Kuantitatif

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) secara kuantitatif didasarkan atas hasil evaluasi melalui penyebaran angket sehingga datanya bersifat kuantitatif, terdiri atas dua jenis evaluasi, yaitu :

#### 1) Evaluasi Pelaksanaan PKM.

Evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM), dilakukan untuk mengetahui kualitas proses, relevansi materi yang disajikan, dukungan para pihak, dan manfaat kegiatan yang dirasakan para pemilih pemula. Teknik yang digunakan dalam evaluasi ini adalah penyebaran angket kepada semua peserta penyuluhan yang disebar menjelang akhir

kegiatan. Setelah instrumen pengumpulan data terkumpul kembali, kemudian diolah dan dianalisis serta diinterpretasikan. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Evaluasi Pelaksanaan PKM

No.	Aspek Penilaian	Skor (%)	Kriteria
1	Alur kegiatan PKM	88	Sangat Baik
2	Kesesuaian tema dengan kebutuhan pemilih pemula	92	Sangat Baik
3	Dukungan para pihak	86	Baik
4	Manfaat yang dirasakan pemilih	95	Sangat Baik
Jumlah		361	-
Rata-rata		90,25	Sangat Baik

Hasil PKM 2018, data diolah.

Dengan memperhatikan data yang terdapat pada tabel 4, diketahui bahwa tanggapan mitra dalam hal ini para pemilih pemula terhadap alur pelaksanaan PKM rata-rata sangat baik, aspek manfaat kegiatan memperoleh skor paling tinggi, sampai 95,00% masuk kategori sangat baik. Artinya, dari hasil evaluasi yang mencerminkan persepsi mitra bahwa kegiatan PKM secara umum telah terlaksana dengan sangat baik. Hal ini terjadi karena adanya keterkaitan yang saling mendukung di antara pihak-pihak yang berkepentingan.

## 2) Evaluasi Pelaksanaan Penyuluhan

Evaluasi terhadap pelaksanaan penyuluhan pendidikan politik dilakukan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan minat pemilih pemula dalam berpartisipasi pada kegiatan pemilu. Teknik evaluasi yang digunakan adalah penyebaran angket kepada sejumlah sampel dari peserta penyuluhan pendidikan politik yang terdiri atas pengurus dan anggota Karang Taruna se-Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka. Sampel sebanyak 82 orang ditetapkan dengan rumus Slovin, kemudian disebar secara proporsional agar setiap desa terwakili. Alat pengumpul data berupa angket dengan mengajukan sejumlah pernyataan dan disediakan lima alternatif

jawaban, yaitu Sangat Setuju, Setuju, Ragu-ragu, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju. Pernyataan angket merupakan penjabaran dari aspek-aspek terkait pelaksanaan penyuluhan dituangkan ke dalam 10 butir angket. Kemudian jawabannya diolah dan dianalisis, hasilnya sebagai berikut.

Tabel 5. Hasil Angket Daya Serap Peserta Penyuluhan

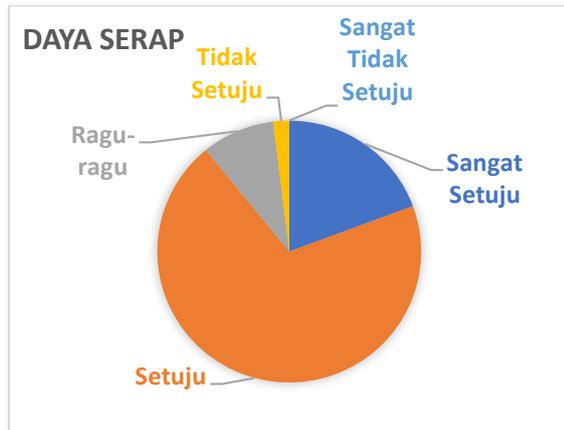
N	Alternatif Jawaban	F	%
82	Sangat Setuju	794	19,36
	Setuju	2860	69,76
	Ragu-ragu	366	8,92
	Tidak Setuju	80	1,96
	Sangat Tidak Setuju	0	0
		4100	100

Sumber: Hasil PKM, 2018

Dari data yang tertera pada tabel 5, diketahui bahwa dari 82 responden yang memilih alternatif jawaban sangat setuju (SS) sebesar 19,36%, memilih alternatif jawaban setuju (S) sebesar 69,76%, memilih alternatif jawaban ragu-ragu (RR) sebesar 8,92%, memilih alternatif jawaban tidak setuju (TS) sebesar 1,96%, dan tidak ada satu pun yang memilih alternatif jawaban sangat tidak setuju (STS) atau 0%. Dengan demikian, diketahui dengan jelas bahwa sebagian besar responden memberikan respon positif terhadap penyuluhan pendidikan politik bagi pemilih pemula yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna se-Kecamatan Panyingkiran. Hasil evaluasi tersebut menggambarkan hasil keseluruhan yang melibatkan 445 orang peserta penyuluhan yang berasal dari sembilan desa yang ada di wilayah Kecamatan Panyingkiran.

Apabila dikaitkan dengan materi yang disajikan, hasil evaluasi berupa besaran persentase tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan, pemahaman, dan wawasan pemuda sebagai pemilih pemula tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945; Demokrasi dan sistem politik di Indonesia; dan pemilu sebagai implementasi sistem demokrasi berlandaskan Pancasila meningkat lebih dari 69%. Demikian juga tentang kesadaran berpolitik dan minat untuk berpartisipasi dalam Pemilu meningkat lebih dari 69%. Untuk lebih jelasnya, sebaran alternatif jawaban responden tentang hasil penyuluhan tentang

pendidikan politik bagi pemilih peneliti sajikan dalam bentuk grafik di bawah ini.



Gambar 1. Grafik daya Serap Peserta Penyuluhan Pendidikan Politik

Dari gambaran tentang sebaran jawaban responden yang tertera pada gambar 1, walaupun tidak semua responden memilih alternatif jawaban sangat setuju (SS) dan setuju (S), tetapi sebagian besar memberikan respon positif karena dari frekuensi jawaban sebanyak 4100 butir, sebanyak 3654 butir menjawab sangat setuju dan setuju dalam arti tujuan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam kegiatan penyuluhan pendidikan politik bagi pemilih pemula yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna se-Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka untuk membangun gerakan memilih yang cerdas, kritis, dan berorientasi kepada masa depan bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 tercapai dengan baik.

#### b. Hasil Kegiatan Secara Kualitatif

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara kualitatif dilihat dari proses dan produk yang diperoleh mitra setelah mengikuti rangkaian kegiatan. Sesuai dengan masalah yang teridentifikasi, hasil kegiatan penyuluhan pendidikan politik ditunjukkan dengan hal-hal sebagai berikut.

1) Para pemilih pemula pemuda Karang Taruna peserta penyuluhan memahami pentingnya pendidikan politik, sehingga peserta memperlihatkan minat yang besar untuk mengikuti kegiatan sampai akhir dan bersedia mengikuti semua tahapan dalam kegiatan penyuluhan.

Setelah mengikuti kegiatan permilih pemula mengetahui dan memahami bahwa mempelajari politik bukan sesuatu yang tabu, karena pada hakikatnya semua orang akan terlibat dalam kegiatan politik baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, setelah mengikuti kegiatan peserta memahami bahwa aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan produk sistem politik.

- 2) Setelah mengikuti pemaparan tentang sistem politik demokrasi di Indonesia, pemilih pemula pemuda Karang Taruna memahami bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Pemahaman seperti itu dapat dipertegas dipercaya melalui pelaksanaan pemilu, dalam arti semua warga negara memiliki hak pilih yang harus disalurkan sesuai dengan jalur yang sah sehingga dapat mewujudkan makna kekuasaan di tangan rakyat.
- 3) Setelah mengikuti penyuluhan tentang pendidikan politik, para pemilih pemula pemuda Karang Taruna memahami bahwa pemilu merupakan implementasi sistem politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam sila keempat dari Pancasila, dinyatakan "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". Pemilu, merupakan implementasi dari sila keempat dari Pancasila tersebut. Karena untuk mewujudkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan merealisasikan prinsip perwakilan dalam permusyawaratan, diperlukan adanya pemilu untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat. Dengan kata lain, pemilu merupakan implementasi sistem demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- 4) Setelah mengikuti penyuluhan pendidikan politik, melalui pemahaman tentang hakikat Pancasila dan UUD 1945, demokrasi dan sistem politik di Indonesia, pemilu sebagai implementasi sistem demokrasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, para pemilih pemula pemuda Karang Taruna se-Kecamatan Panyingkiran memiliki wawasan tentang pemilu dan mulai tumbuh kesadaran untuk menjadi warga negara yang baik dibuktikan dengan kesediaan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Secara lebih

spesifik, berjanji akan datang ke TPS pada waktunya untuk memberikan hak suara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Suatu hal yang sangat berharga, para peserta mulai memahami bahwa menentukan pilihan dalam pemilu merupakan hak pribadi yang dilindungi undang-undang, sehingga dapat memilih secara kritis, rasional, dan memiliki visi ke depan. Pemilih pemula akan menentukan pilihan setelah mereka memahami visi dan misi kontestan pemilu.

Dengan demikian, adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan pendidikan politik bagi pemilih pemula pemuda yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna se-Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka diharapkan dapat memberikan manfaat dalam upaya meningkatkan kesadaran dan minat pemuda untuk terlibat langsung dalam proses pemilihan umum yang merupakan bagian yang terpisah dengan sistem politik demokrasi di Indonesia.

## SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) melalui pelaksanaan penyuluhan pendidikan politik bagi pemilih pemula pemuda yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna berhasil meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan mitra tentang makna ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi dan sistem politik yang berlaku di Indonesia, pemilu sebagai implementasi dari Pancasila, serta memiliki kesadaran dan minat yang tinggi untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya sebagai wujud tanggung jawab warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu, pemuda memahami betul bahwa ikut terlibat dalam kegiatan pemilu secara sadar dan berbekal pengetahuan tentang politik yang

benar akan mampu memilih secara rasional dan bertanggung jawab untuk ikut menentukan nasib bangsa di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Iin, Gubsu (2012). *Karang Taruna Pilar Kekuatan Masyarakat*, (<http://beritasore.com/2012>), diakses 25 Juni 2019.
- Instruksi Presiden RI No. 12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Generasi Muda
- Peraturan Menteri Sosial RI No. 83/HUK/2005, tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 36/2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Sudono, Dwi (2008), Pemberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Indonesia, *Jurnal Penyuluhan*, 4(1), 65-74
- Undang-Undang Dasar RI 1945.  
<https://infopemilu.kpu.dpt>  
<https://www.tintahijau.com.portal> berita generasi milenial  
<https://kbbi.onloine.suluh>  
<https://www.bps.2013>.

## BIOGRAFI PENULIS



Yeti Kuswati, Lektor. Dosen pada Program Studi Administrasi Publik (AP), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Majalengka. Mengampu mata kuliah Kebijakan Publik, Teori Organisasi, Teknologi Administrasi, dan Analisis Kebijakan Publik. Buku yang telah diterbitkan antara lain Kebijakan Publik (2020).  
e-mail: yeti.kuswati@yahoo.co.id.